

SATU LANGKAH SERIBU LANGKAH

Pameran Tunggal Akiq AW

SERIBU LANGKAH MENUJU SATU: PROPAGANDA VISUAL KELUARGA BERENCANA DAN MEMORI KOLEKTIF

Citra-citra gambar yang sedemikian dekat dengan keseharian kita; barangkali kita selalu melewatinya dalam perjalanan kita melakukan aktivitas sehari-hari, tapi kita tak pernah menganggapnya sedemikian istimewa. Sebagian dari kita tumbuh besar dengan citra semacam itu sebagai bagian dari lanskap kultural yang membentuk diri kita tak sengaja, sementara beberapa dari kita tak pernah benar-benar mengenalinya, dan sering menganggapnya sebagai citra gambar yang tak pernah punya makna.

Gambar-gambar sederhana ini—idealisasi atas konsep keluarga—nyaris seragam di berbagai tempat; Bapak Ibu, dan dua anak—adalah alat ampuh untuk mengampanyekan program Keluarga Berencana selama masa Orde Baru. Program ini merupakan program andalan keluarga Soeharto, yang terutama bertujuan untuk mengontrol pertumbuhan penduduk Indonesia, hampir bersamaan dengan intensifikasi ideologi developmentalisme yang digembor-gemborkan semenjak pertengahan 1970an. Sebagaimana program-program Orde Baru yang lain, moda kampanye yang menggunakan piranti kekuasaan dari hulu ke hilir, dari pemerintah pusat yang dominan hingga ke perangkat desa yang sangat terkontrol, membuat program ini seperti menjadi konstruksi sosial baru atas konsep keluarga di Indonesia. Dan saya kira, Akiq AW adalah bagian dari generasi yang tumbuh dengan konstruksi keluarga baru ini, dan mendapatkan terpaan yang menjadi bagian dari ingatan kolektif

atas ketegangan antara "individu" dan "komunitas" di lingkungan sekitarnya.

Akiq AW sendiri lahir di sebuah pinggiran kota kecil di Jawa Timur, pada kisaran 1970an, yang berarti program ini baru-baru saja diluncurkan oleh Pemerintah, dan program-program kampanye masih baru diperkenalkan. Di pinggiran kota, hampir di seluruh wilayah di Indonesia, "ilusi" dan "imajinasi" baru tentang keluarga modern ditancapkan ke benak para warga, nyaris memupus konsep keluarga besar yang telah bertahun-tahun menghidupi masyarakat, yang dalam konsep Jawa banyak disebut sebagai "banyak anak, banyak rejeki".

Setelah Orde Baru berlalu, program ini tidak terlalu gencar dikampanyekan, bahkan lembaga pemerintahan yang menjalankan program ini sempat dibekukan pada pemerintahan Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Ingatan kolektif tentang citra-citra keluarga berencana, meski perlahan, tampaknya kian pudar, terutama pada generasi yang lahir pada kisaran waktu menjelang reformasi 1998. Dengan merekam artefak-artefak yang masif dibangun selama lebih dari 25 tahun, Akiq AW seperti ingin merefleksikan kembali jejak yang nyaris terlupa tentang sebuah proyek kekuasaan, dan melihatnya dalam cara yang berbeda dalam konteks waktu yang berbeda pula.

Akiq memulai proyek ini ketika ia berada dalam masa residensi di Alice Spring, dan mengalami langsung perdebatan tentang identitas keaslian, gagasan tentang masyarakat indigineous dan ilusi tentang cara-cara hidup modern yang dipaksakan oleh institusi negara. Dari perenungannya tentang moda-moda pemaksaan cara hidup yang baru inilah kemudian Akiq mulai menelusuri tentang program KB dan bagaimana program ini mengubah pandangan masyarakat tentang keluarga. Melalui kampanye yang intensif, maka mereka menumbuhkan nilai-nilai yang baru sesuai hegemoni yang dikonstruksi oleh negara melalui berbagai pirantinya.

Meskipun berangkat dari perihal yang sangat personal, yakni keluarga, melalui proyek pendokumentasian ini Akiq AW menunjukkan bagaimana hal-hal yang pribadi berkelindan dengan proyek-proyek besar negara, dan dalam jangka waktu yang panjang, bagaimana moda total kontrol ini menjadi bagian yang membentuk identitas kolektif. Bagian terbesar yang menarik dari proyek ini adalah mengajak kita untuk mempertanyakan lagi konstruksi sosial yang menjadi bagian dari diri kita—tentang pernikahan, keluarga, imaji masa depan—dan mulai mencari hal-hal yang kita terima sebagai terberi (given).

Keluarga Berencana: Citra Keluarga Ideal Masa Orde Baru

Program pembatasan anak yang bertujuan untuk mengontrol pertumbuhan penduduk tentu bukan hanya terjadi di Indonesia. Di negara besar yang lain, katakanlah Cina, program ini justru dilakukan dengan lebih masif, tersistem dan, karena latar belakang ideologi politik negara yang sangat kuat sosialisme-nya, maka ia bersifat sangat *top down*. Berbeda dengan pemerintah Cina yang secara terang-terangan menunjukkan kontrol dan kuasa kepada rakyatnya, program pembatasan jumlah penduduk di Indonesia masih ditunjukkan dalam cara-cara kampanye yang halus dan tersembunyi.

Program KB lahir juga sebagai proses atas pemikiran dan dialektika panjang tentang konsep keluarga dan kependudukan. Holy Rafika dengan menarik membeberkan bagaimana Orde Baru melihat pentingnya program KB sebagai bagian untuk menciptakan keluarga sebagai instrumen politik. Tahun 1969, Persatuan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI), sebuah lembaga masyarakat yang berdiri sejak 1957, menerbitkan penelitian mengenai peran Kartu Keluarga untuk penghitungan populasi. Selanjutnya, pada 1971, KK digunakan sebagai alat konfirmasi kebenaran Sensus Penduduk. Pada saat itu, keluarga bertemu dengan sebuah bidang pembicaraan yang lain lagi bernama Keluarga Berencana.¹ Selanjutnya, Holy juga menyebutkan bagaimana

¹ Rafika D, Holy. "Orde Baru dan Pembentukan Keluarga", disampaikan sebagai makalah dalam diskusi/simposium "Orde Baru: Ok Video" sesi panel "Televisi

sesungguhnya program ini juga merupakan bagian dari proses internasional untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan pembatasan jumlah populasi.

Pada kisaran 1980an hingga 1990an, jargon-jargon seperti “dua anak saja cukup” menjadi sesuatu yang sangat akrab di telinga, terutama disampaikan melalui beragam medium propaganda yang semuanya diseragamkan di seluruh nusantara. Untuk mendukung program KB Pemerintah Orde Baru juga mensosialisasikan Norma Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera (NKKBKS) yang mendorong penciptaan keluarga kecil cukup dengan dua anak saja. Disebutkan bahwa tujuan KB; “dengan keluarga berentjana kita akan mendapatkan keluarga yang sehat, sejahtera baik jasmani, rohani maupun sosial.”

Pada akhirnya program KB cukup berhasil menurunkan tingkat kelahiran dari 5,61 persen pada tahun 1970an menjadi 2,78 persen pada tahun 1997. Selama 20 tahun lebih, program ini juga acap menjadi ukuran keberhasilan bagi para kepala daerah, sehingga koordinasi dengan unit-unit pemerintahan terkecil digencarkan sehingga setiap daerah bisa mencapai target dari pemasangan atau penggunaan kontrasepsi bagi perempuan.

Gagasan tentang keluarga ideal dengan dua anak ini digambarkan nyaris sama: Bapak Ibu dan dua anak, laki-laki perempuan, bergandengan tangan. Posisi ayah di kanan, dua anak di tengah, lalu ibu di sebelah kiri. Hanya beberapa gambar yang menunjukkan posisi berbeda, di mana ayah ibu ada di tengah, kedua anak seperti mengapit mereka. Posisi ini dianggap sebagai komposisi wajar terutama karena dua orang tua tampak bersama-sama melindungi anaknya. Yang juga penting dipertanyakan adalah mengapa kedua anak ini harus laki-laki

Orde Baru dan Keluarga Indonesianya,” yang kemudian dimuat dalam jurnal Indo Progress <https://indoprogress.com/2015/08/orde-baru-dan-pembentukan-keluarga/>

dan perempuan? Apakah ini menunjukkan pentingnya konsep kedua jenis kelamin dalam sebuah keluarga?

Berkaitan dengan komposisi atau posisi, salah satu gambar menarik adalah yang ditemukan di sebuah desa di Kediri, di mana sang ibu berada di posisi kanan, tampak menunjuk entah apa dengan jari telunjuknya. Posisi ini tentu saja berbeda dengan kecenderungan gambar lain yang menunjukkan stereotip tradisional atas perempuan yang lebih sering digambarkan sebagai pihak yang submisif. Satu-satunya ibu yang tampak berbeda ini seperti menunjukkan adanya keinginan untuk membuat perempuan dalam posisi yang juga memiliki kekuasaan untuk berdaulat terhadap dirinya sendiri maupun dalam relasinya dengan keluarga.

Membicarakan posisi perempuan, terutama dalam kaitannya dengan program KB akan selalu menarik terutama karena program KB ini, terutama setelah Orde Baru tumbang, mendapatkan kritik gencar dari kelompok feminis yang melihatnya sebagai upaya kontrol dan komodifikasi tubuh perempuan. Kurniawati Hastuti Dewi (2011) menyebut bahwa "Program KB merupakan manifestasi peran perempuan sebagai *biological reproduction of the nation*." Lebih lanjut ia mempertanyakan, "Bagaimana tidak tubuh perempuan menjadi sasaran utama program KB dengan beragam alat kontrasepsi untuk mengendalikan fungsi reproduksi demi menurunkan jumlah penduduk." ² Tubuh perempuan menjadi arena kontestasi bagi berbagai kelompok politik untuk mengamankan agenda mereka. Pada akhirnya, gerakan perempuan seperti dijinakkan melalui pembentukan lembaga-lembaga seperti PKK dan Dharma Wanita, yang secara struktural juga mengarah pada domestifikasi kelompok perempuan terutama pada kelas menengah.

² Dewi, Kurniawati Hastuti. "Demokratisasi dan Dekonstruksi Ideologi Gender Orde Baru" dalam jurnal LIPI, diakses melalui internet <http://ejournal.lipi.go.id/index.php/jpp/article/viewFile/450/263>

Pada periode selanjutnya, terutama di kisaran akhir 1990an, isu tentang kontrasepsi ini juga merujuk ke persoalan regulasi seksual, akibat kekhawatiran bahwa penjualan kontrasepsi secara bebas akan mendorong perilaku seksual yang aktif dari remaja. Iklan-iklan kontrasepsi yang sempat sering muncul di televisi atau media massa kemudian berkurang drastis, atau bahkan dilarang karena dianggap mengafirmasi perilaku seks bebas di kalangan remaja.

Hal lain yang menarik dalam citra gambar yang muncul dari proyek dokumentasi adalah bagaimana identitas keibuan yang dimunculkan oleh program KB secara tidak langsung merepresentasikan ideologi ibuisme Orde Baru, melalui penggambaran sosok ibu dalam busana kebaya. Pada masa ketika program KB gencar dikampanyekan, kebaya juga disebarluaskan sebagai busana adat nasional, sehingga ia tidak hanya dijumpai di Jawa, tetapi juga di wilayah-wilayah lain di Indonesia. Kebaya menjadi simbol perempuan Indonesia, yang salah satunya diperkuat melalui penampilan Ibu Tien (Istri Soeharto), dalam acara-acara resmi kenegaraan. Kebaya, sanggul, dan selendang menjadi simbol-simbol femininitas bagi perempuan selama masa Orde Baru.

Salah satu gambar menunjukkan seorang ibu yang mengenakan hijab—yang menurut keterangan Akiq AW relief ini ditemukan di Sanden, Bantul, Yogyakarta—sebuah fenomena yang semakin umum dijumpai pasca pertengahan tahun 1990an atau 2000an. Rachel Rinaldo mencatat bahwa semakin banyaknya perempuan yang mengenakan hijab atau jilbab, pada awalnya (1990an) selain menunjukkan keterhubungan terhadap komunitas Muslim global, juga merupakan sebuah cara untuk menunjukkan sikap oposisi terhadap negara.

Patung dan Ruang Publik Sekitar Kita

Selain membicarakan narasi besar tentang Negara dan Keluarga Berencana, dalam pameran ini saya tertarik untuk membingkai pula tentang gagasan ruang publik yang secara tak langsung muncul dari

proyek dokumentasi ini. Hampir semua citra visual kampanye KB ini muncul di ruang-ruang terbuka yang paling strategis di desa. Desa memang menjadi ruang kontestasi sangat besar pada masa Orde Baru; tak hanya kampanye KB, di ruang-ruang itu kita menemukan Koran Masuk Desa (yang diinisiasi oleh Departemen Penerangan—sekarang tak ada lagi), juga kampanye tentang ABRI Masuk Desa (AMD), atau sesekali informasi tentang program transmigrasi. Biasanya “ruang publik” ini seperti jalan masuk utama menuju wilayah sebuah desa, dimulai dengan gapura, atau bisa lebih besar membentuk perempatan jalan yang cukup lapang. Jika ada ruang lain yang masih bisa diintervensi, sering pula kita mendapati sebuah papan berisi 10 Program Pokok PKK, yang seperti mengingatkan dogma-dogma tentang bagaimana ibu dan kaum perempuan menjaga “kesejahteraan keluarga”. Sesekali kita bisa menemukan pula patung polisi di beberapa gang kampung, seperti menjadi penjaga atau imajinatif bagi warga, atau pengingat atas adanya kontrol institusional. Semua medium kampanye itu seperti menjadi sebuah perayaan atas nilai dan norma sosial yang dibentuk oleh pemerintah, dan dihidupi dalam lingkungan keseharian oleh warga nyaris sebagai dekorasi kampung dan desa. Bagi sebagian generasi yang kini menjadi kelas menengah Indonesia, citra-citra inilah yang menjadi latar belakang dari kegiatan bermain bersama anak-anak kampung di masa itu.

Saya sendiri tumbuh dan besar di sebuah kampung tengah kota, Yogyakarta, yang barangkali secara lanskap sangat berbeda dengan desa-desa di Jawa, di mana tak ada kemewahan ruang publik untuk membuat aneka macam dekorasi desa. Tapi hampir setiap liburan kami berkunjung ke rumah nenek, menghabiskan seminggu hingga sebulan waktu di sana. Saya mengingat dengan baik bagaimana “tugu dan monumen” penuh jargon ini semacam menjadi tempat penanda (landmark) bagi ruang bermain kami. Kadang-kadang saya merasa bahwa situasi keluarga saya tak terwakili di relief-relief keluarga berencana itu, terutama karena saya punya tiga saudara, jadi gambar-gambar itu jelas “bukan kami”. Akan tetapi, semua jargon itu seperti

kami telan dan kami masukkan ke dalam ingatan seperti resep dokter yang harus diminum rutin.

Perihal bagaimana medium-medium yang sifatnya visual bisa mempengaruhi kesadaran bersama sesungguhnya sudah disadari semenjak lama oleh para penguasa. Professor Matteo Stocchetti menyebut bahwa setiap rezim pemerintahan memerlukan propaganda karena hal itu berhubungan dengan distribusi pengetahuan, dan sesungguhnya ia tidak hanya mengandung dimensi politis, tetapi juga pedagogis. Propaganda tidak melulu bertujuan untuk mengubah cara berpikir masyarakat, tetapi juga menginspirasi perubahan komunal yang sistemik.³ Kekuatan imaji (*the power of image*) bisa jadi juga berkaitan dengan kontestasi antara masyarakat umum dengan penguasa, untuk mendukung atau untuk memanipulasi "suara politis". Membangun tugu-tugu peringatan dengan rupa yang seragam di ruang publik juga merupakan upaya rezim Orde Baru untuk membuat perubahan komunal yang sistemik.

Ruang luang di sekitar lapangan atau perempatan desa itulah perwujudan gagasan ruang publik yang nyata dalam keseharian masyarakat Indonesia. Ruang-ruang semacam ini juga acapkali berubah menjadi panggung ketika dihelat acara perayaan memperingati hari kemerdekaan, tempat bersilaturahmi pada saat Idul Fitri, dan berbagai peristiwa sosial lain yang bersifat *festive* dan komunal. Di hari-hari biasa, bila sore tiba, seringkali para ibu bertemu membawa anak-anak balitanya bermain di sekitar perempatan utama ini, menunggu matahari hampir terbenam. Jika di Italia ruang-ruang seperti ini biasa berbentuk piazza or plaza, dengan patung-patung klasik di tengah-tengahnya,

³ On Visual Propaganda in the Digital Age. An interview with Matteo Stocchetti. <http://fresh-eye.cz/on-visual-propaganda-in-the-digital-age-an-interview-with-matteo-stocchetti/2017/04/>

maka desa-desa di Indonesia mengadopsi perempatan jalan dengan lebih sederhana sebuah ruang bertemu. Tidak mengherankan jika ruang-ruang sosial terbuka seperti ini dilihat sebagai celah untuk memasukkan ideologi-ideologi politik penguasa, melalui berbagai atribut dan dekorasi visual yang bisa mempengaruhi persepsi komunal.

Bentukan relief yang kita temukan dalam berbagai tugu dan monumen ini sendiri tampaknya muncul sebagai pilihan yang praktis: mudah dibuat, biaya produksi relatif murah dan bisa bertahan untuk jangka waktu yang lama. Pilihan membuat “potret keluarga tiga dimensi” ini juga secara langsung merujuk pada kemungkinan untuk menggunakan bahasa gambar yang bercerita (story telling). Tetapi, meskipun demikian, saya tertarik untuk melihatnya sebagai bagian dari turunan sejarah di mana citra-citra relief semacam ini juga dengan mudah kita jumpai pada candi-candi purbakala. Secara sederhana, relief adalah suatu seni pahat atau ukiran 3 (tiga) dimensi pada media batu. Biasanya relief ini berisi ajaran filosofis atau kisah metaforis tentang mitologi atau kisah spiritualitas tertentu yang ingin disampaikan pada generasi-generasi berikut. Hampir setiap candi mempunyai narasi sendiri yang diceritakan melalui bentuk relief. Demikianlah, barangkali relief ini menjadi sebuah medium purba yang seperti tak lekang waktu, ia masih kita temukan di sana-sini sebagai bagian dari proyek-proyek dekorasi di berbagai sudut lingkungan kehidupan kita.

Pada masa Orde Baru, ada beberapa bengkel lokal yang biasanya dipesan oleh perangkat desa untuk membuat patung-patung sederhana ini. Setelah Orde Baru tumbang dan program KB tidak lagi dikampanyekan secara intensif sebagai bentuk kontrol negara terhadap keluarga, maka proyek pembuatan patung relief potret keluarga ini dikerjakan lebih mana suka. BKKBN tetap menghubungi pemerintah desa setempat, menawarkan jika mereka berkenan untuk membuat, memperbarui atau mengganti potret keluarga ini dengan fasilitasi tertentu dari BKKBN, tetapi pendanaan utama tetap ditanggung oleh pemerintah

desa.⁴ Tidak semua wilayah perumahan baru bersedia mengeluarkan dana-dana semacam ini, dan, di luar alasan praktis semacam itu, saya kira keengganan ini juga menunjukkan melunturnya cara-cara penyeragaman dan bahwa kesadaran bahwa “kesejahteraan keluarga” tidak perlu lagi digembar-gemborkan dengan pembangunan monumen seperti yang dilakukan di masa lalu.

Ketika mempersiapkan pameran ini, saya sempat berbincang dengan sekelompok anak muda yang mampir ke ruang pamer, mengintip karya. Iseng saja saya bertanya pada mereka apakah mereka mengerti gambar-gambar yang sedang dipajang tersebut, dan mereka mengatakan tidak. Ketika saya menjelaskan bahwa ini adalah relief untuk mengkampanyekan KB, mereka juga tidak terlalu memahami nilai penting program KB ini dalam gerakan politik Orde Baru dan bagaimana citraan visual secara signifikan membantu pembentukan memori kolektif atas propaganda ini. Belum dua puluh tahun semenjak reformasi berlalu, dan ingatan tentang konstruksi keluarga ideal bentukan Soeharto ini seperti telah memudar. Barangkali tidak saja karena mesin propaganda telah dilemahkan, tetapi juga karena berubahnya pola-pola ruang publik di kampung, dan gagasan ruang sebagai agora semakin tidak berasa, sehingga sebagian besar dari generasi baru ini melihat gambaran potret keluarga berencana di pinggir jalan barangkali hanya sebagai dekorasi, tak punya pijakan ideologi, dan suaranya bahkan terasa kalah oleh gencarnya baliho-baliho yang bertebaran di berbagai sudut kota.

ALIA SWASTIKA

⁴ Informasi dari percakapan informal saya dengan seorang teman yang menjadi staff BKKBN. Saya menemui teman ini bersama Akiq AW untuk mencari tahu apakah kami bisa mengakses arsip-arsip bekas kampanye KB yang disimpan oleh BKKBN. Teman saya dengan bersenang hati menjanjikan akan mencari tahu tentang keberadaan arsip itu. Beberapa hari kemudian, ia menyebutkan pada saya bahwa tidak ada keterangan tentang di mana semua arsip tersebut, terutama karena setelah pembekuan di masa Gus Dur dan dibukanya kembali BKKBN pada pemerintahan selanjutnya seperti menjadi lembaga yang baru, nyaris lepas dari sejarah sebelumnya.